



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn tertanggal 21 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan istrinya yang bernama XX telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juni 1974, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 139/II/126/1974 Tanggal 01 Juni 1974);
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Istri Pemohon berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Istri Pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama 1. XX umur 42 tahun, 2. XX umur 39 tahun (sudah meninggal dunia), 3. XX umur 36 tahun, 4. XX umur 33 tahun, 5. XX umur 31 tahun, 6. XX umur 23 tahun;

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2012 Istri Pemohon yang bernama XX telah putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggal Dunia karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian terlampir, sehingga pada saat ini Pemohon seorang diri mengajukan Perubahan Biodata pada Buku Nikah Pemohon dan Istri Pemohon di Pengadilan Agama Tuban;
5. Bahwa dalam Akta nikah Pemohon dan Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 139/I/126/1974 Tanggal 01 Juni 1974, tertulis **Nama Pemohon XX Tempat dan tanggal lahir Makamagung, 35 th**, dan **Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Jenggolo, 18 th**, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, SK tertulis **Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938** dan pada dokumen pribadi isteri Pemohon seperti Surat Keterangan Kematian dan KK (Kartu Keluarga) tertulis **Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956** sehingga terjadi perbedaan;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon tersebut tertulis, **Nama Pemohon XX Tempat dan tanggal lahir Makamagung, 35 th**, dan **Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Jenggolo, 18 th**, Nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
7. Bahwa nama dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon dan isteri Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan dokumen pribadi isteri Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938** dan **Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon pada Akta Nikah Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan dokumen pribadi isteri Pemohon;
8. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Akta Kelahiran cucu Pemohon;
9. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon XX Tempat dan tanggal lahir Makamagung, 35 th, dan Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Jenggolo, 18 th**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 139/I/126/1974 Tanggal 01 Juni 1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938 dan Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Kelahiran atas Nama **XX**, Nomor 555/1987, tanggal 16 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)
2. Fotocopi Akta Kelahiran atas Nama **XX**, Nomor 209/1985, tanggal 30 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata **XX**, Nomor 470/644/414.416.10/2018, tanggal 01 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotocopi Surat keterangan Beda Biodata **XX**, Nomor 470/690/414.416.10/2018, tanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kingking Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah TK 1 Jawa Timur Nama **XX**, Nomor 804/Pt/AlII/Grt.1/K.12/BP.19847, tanggal 25 April 1962, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah TK 1 Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban tertulis **Nama Pemohon XX Tempat dan tanggal lahir Makamagung, 35 th, dan Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Jenggolo, 18 th**, tetapi dalam Dokumen Pemohon yang lain, seperti, Surat Keputusan Surat Keterangan beda nama dari kelurahan Kingking Akta Kelahiran anak tertulis, **Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938 dan** isteri Pemohon **XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan penetapan perubahan biodata tersebut, sesuai dengan dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan". Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, para putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa: P.1, P.2, P.4, dan P.5. alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon adalah XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938 dan isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 9 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon XX Tempat dan tanggal lahir Makamagung, 35 th, dan Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Jenggolo, 18 th**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 139/I/126/1974 Tanggal 01 Juni 1974 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 Pebruari 1938 dan Nama isteri Pemohon XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Januari 1956;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,00,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi bertepatan dengan 06 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFIJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 9 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0395/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 9 halaman.